

Penguatan tata kelola BUMDes melalui pendampingan keuangan dan sosialisasi pajak di desa Katemas

Omi Pramiana*, Sugeng Suprpto

Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

*Author korespondensi: omi.pramiana@itebisdewantara.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.65881/creative.v1i3.151>

INFO ARTIKEL

History:

Submit: 13-07-2026

Revisi: 17-07-2026

Diterima: 18-07-2026

Terbit: 25-07-2026

Kata kunci:

bumdes;
tata kelola keuangan;
perpajakan desa;
pendampingan;
digitalisasi administrasi.

ABSTRAK

Tujuan: untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes desa Katemas dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan, sosialisasi perpajakan, serta pemanfaatan pembukuan digital guna mewujudkan tata kelola BUMDes yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Metode: menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu observasi awal, pelatihan pengelolaan keuangan dan sosialisasi perpajakan, pendampingan implementasi melalui pembukuan digital, serta evaluasi dan tindak lanjut.

Hasil: adanya peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis, memahami kewajiban perpajakan, serta mulai menerapkan pembukuan digital dalam pengelolaan administrasi usaha.

Kesimpulan: kegiatan pendampingan berhasil memperkuat tata kelola BUMDes melalui peningkatan kompetensi pengurus dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan.

Kontribusi: memberikan model pendampingan terpadu dalam penguatan tata kelola BUMDes melalui peningkatan kapasitas pengurus pada aspek pengelolaan keuangan, kepatuhan perpajakan, dan digitalisasi administrasi.



Artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY-SA.



Pendahuluan

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, serta memperkuat kemandirian masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara produktif (Gani, 2025). Keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga

sebagai penggerak pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga desa (Firmansyah, 2025). Untuk mewujudkan fungsi tersebut, BUMDes perlu didukung oleh tata kelola yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Dahlan et al., 2025). Tata kelola yang akuntabel, transparan, dan profesional menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha serta peningkatan kepercayaan masyarakat maupun mitra eksternal (Mursidah & Mu'awwanah, 2026). Namun demikian, pengelolaan BUMDes di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat (Baharuddin et al., 2025).

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada BUMDes desa Katemas, kecamatan Kudu, kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian pengurus BUMDes belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis serta belum memahami ketentuan perpajakan yang berlaku bagi badan usaha desa. Dokumentasi transaksi keuangan masih dilakukan secara sederhana, belum tersedia format laporan keuangan yang baku, dan administrasi usaha belum terdokumentasi secara optimal. Selain itu, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan masih relatif rendah karena adanya anggapan bahwa pajak hanya akan mengurangi keuntungan usaha. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas pengelolaan BUMDes, menghambat akses terhadap sumber pembiayaan maupun kerja sama dengan pihak eksternal, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMDes (Rinaldi et al., 2025; Sari & Narastri, 2026).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengurus BUMDes melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan mampu meningkatkan kualitas administrasi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa (Be et al., 2024; Monoarfa et al., 2023). Penerapan sistem pencatatan keuangan berbasis teknologi juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes (Erlina & Sirojuzilam, 2020; Isnawati et al., 2026; Wahdah & Huda, 2026). Di sisi lain, sosialisasi perpajakan, peningkatan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan edukasi mengenai manfaat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk badan usaha desa (Adawiyah et al., 2023; Nugroho & Kurnia, 2020; Wardani & Wati, 2018). Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian maupun penelitian sebelumnya masih berfokus pada salah satu aspek, yaitu pendampingan keuangan atau sosialisasi perpajakan secara terpisah. Padahal, kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang berkelanjutan. Selain itu, kajian maupun program pengabdian yang secara spesifik mengintegrasikan pendampingan pengelolaan keuangan dengan edukasi perpajakan pada BUMDes desa Katemas masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan program pengabdian yang mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut sebagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes (Khoirunnisa, 2025; Lazuardi et al., 2026).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola BUMDes Desa Katemas melalui pendampingan pengelolaan keuangan dan sosialisasi perpajakan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pengurus dalam melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan keuangan yang sistematis, akurat, dan transparan, serta memahami ketentuan perpajakan yang relevan bagi BUMDes. Pendampingan dilakukan secara partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, praktik

penyusunan laporan keuangan, serta edukasi mengenai administrasi perpajakan sehingga pengurus mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan usaha sehari-hari (Mustoffa et al., 2025; Rinaldi et al., 2025).

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan tercipta peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dalam mengelola administrasi keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan tata kelola tersebut diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas BUMDes di mata masyarakat maupun lembaga pendukung, memperluas peluang akses terhadap pembiayaan dan kemitraan usaha, serta mendukung pengembangan usaha desa secara berkelanjutan. Selain memberikan manfaat praktis bagi BUMDes Desa Katemas, kegiatan ini juga diharapkan menjadi model pengabdian yang mengintegrasikan pendampingan keuangan dan edukasi perpajakan sebagai strategi peningkatan tata kelola BUMDes, sehingga dapat direplikasi pada desa-desa lain dengan karakteristik yang serupa (Be et al., 2024; Khoirunnisa, 2025).

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di BUMDes desa Katemas, kecamatan Kudu, kabupaten Jombang, dengan sasaran utama pengurus BUMDes sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perpajakan. Program ini menggunakan metode pendampingan partisipatif (*participatory mentoring*) yang mengombinasikan observasi, pelatihan, praktik, pendampingan, serta evaluasi. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan dalam aktivitas operasional BUMDes. Melalui metode tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas pengurus dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dalam empat kali kunjungan yang saling berkesinambungan. Tahapan dimulai dari identifikasi kondisi awal, dilanjutkan dengan pelatihan dasar, penguatan implementasi melalui digitalisasi, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Alur pelaksanaan kegiatan pengabdian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 tahapan pelaksanaan program pengabdian

Observasi awal (kunjungan 1)

Tahap pertama bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi awal tata kelola BUMDes, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan perpajakan. Kegiatan dilakukan melalui wawancara dengan pengurus, observasi terhadap aktivitas operasional, serta penelaahan dokumen administrasi dan laporan keuangan yang tersedia. Hasil observasi menunjukkan bahwa BUMDes Desa Katemas memiliki potensi usaha yang cukup baik, namun pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, belum menggunakan format laporan keuangan yang baku, serta pemahaman pengurus mengenai kewajiban perpajakan masih terbatas. Temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi dan strategi pendampingan pada tahap berikutnya.

Pelatihan dasar keuangan dan perpajakan (kunjungan 2)

Tahap kedua difokuskan pada peningkatan kompetensi pengurus BUMDes melalui pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan sederhana dan pemahaman dasar perpajakan. Materi yang diberikan meliputi pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan laba rugi dan arus kas sederhana, serta pengenalan kewajiban perpajakan BUMDes, mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Pelatihan dilaksanakan secara interaktif dengan menggunakan contoh transaksi riil BUMDes sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan materi yang diberikan.

Penguatan implementasi dan digitalisasi (kunjungan 3)

Tahap ketiga bertujuan memperkuat penerapan hasil pelatihan melalui pendampingan intensif. Pengurus BUMDes dibimbing dalam menyusun laporan keuangan secara berkala, melakukan pengelolaan arus kas, serta menyusun perencanaan keuangan yang mendukung pengembangan usaha. Selain itu, peserta diperkenalkan pada penggunaan aplikasi pembukuan digital sebagai alternatif pencatatan keuangan yang lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan penguatan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari tata kelola BUMDes yang profesional.

Evaluasi dan tindak lanjut (kunjungan 4)

Tahap terakhir merupakan kegiatan evaluasi terhadap efektivitas program pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, penelaahan hasil pencatatan keuangan yang telah disusun peserta, serta identifikasi kendala yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan maupun perpajakan. Berdasarkan hasil evaluasi, diberikan pendampingan lanjutan sesuai kebutuhan peserta, terutama terkait penyempurnaan laporan keuangan, penggunaan aplikasi pembukuan, dan pelaporan pajak. Tahap ini juga menghasilkan rekomendasi tindak lanjut agar pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari tata kelola BUMDes.

Rangkaian kegiatan pendampingan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes desa Katemas dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, memahami kewajiban perpajakan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi usaha. Dengan pendekatan yang berkelanjutan melalui observasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi, program ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola BUMDes sehingga lebih profesional, transparan, dan memiliki daya saing yang lebih baik dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

Hasil dan pembahasan

Pelaksanaan program penguatan tata kelola BUMDes melalui pendampingan keuangan dan sosialisasi pajak di desa Katemas, kecamatan Kudu, kabupaten Jombang dilaksanakan melalui empat tahapan kegiatan yang saling berkesinambungan, yaitu observasi awal, pelatihan dasar keuangan dan perpajakan, penguatan implementasi melalui digitalisasi, serta evaluasi dan tindak lanjut. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan pengurus BUMDes sebagai peserta utama. Pendekatan pendampingan yang digunakan memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara tim pelaksana dan peserta sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hasil setiap tahapan kegiatan dijelaskan sebagai berikut.

Observasi awal dan identifikasi permasalahan

Tahap pertama bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi eksisting tata kelola BUMDes desa Katemas. Kegiatan dilakukan melalui wawancara dengan pengurus, observasi terhadap aktivitas operasional, serta penelaahan dokumen administrasi dan keuangan yang dimiliki BUMDes. Berdasarkan hasil identifikasi, BUMDes desa Katemas mengelola beberapa unit usaha yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, yaitu unit usaha perdagangan, jasa, dan pengolahan produk berbasis potensi lokal. Ketiga unit usaha tersebut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa dan memiliki peluang untuk terus dikembangkan.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa tata kelola administrasi dan keuangan belum berjalan secara optimal. Pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas sederhana sehingga informasi keuangan belum tersusun secara sistematis. Laporan keuangan periodik seperti laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan belum tersedia secara lengkap. Selain itu, pemahaman pengurus mengenai kewajiban perpajakan BUMDes masih terbatas sehingga administrasi perpajakan belum menjadi bagian dari sistem pengelolaan usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama bukan terletak pada potensi usaha, melainkan pada kapasitas pengelola dalam mengelola administrasi keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hasil observasi awal menjadi dasar dalam penyusunan materi pendampingan sehingga solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan BUMDes.

Tabel 1 kondisi awal tata kelola BUMDes desa Katemas

Indikator	Kondisi sebelum pendampingan
Sistem pencatatan transaksi	Masih menggunakan buku kas manual dan belum terpisah berdasarkan akun
Penyusunan laporan keuangan	Belum tersedia laporan laba rugi dan laporan keuangan periodik
Administrasi perpajakan	Pengurus belum memahami kewajiban perpajakan BUMDes
Pemanfaatan teknologi	Belum menggunakan aplikasi pembukuan digital

Sumber: data primer, diproses

Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengurus BUMDes perlu difokuskan pada dua aspek utama, yaitu penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan peningkatan literasi perpajakan agar tata kelola usaha menjadi lebih akuntabel.

Pelatihan dasar keuangan dan sosialisasi perpajakan

Tahap kedua dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kompetensi pengurus BUMDes dalam pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha, pertanggungjawaban kepada pemerintah desa, serta sebagai dokumen pendukung dalam memperoleh akses pembiayaan. Selanjutnya peserta diberikan pelatihan mengenai pencatatan transaksi harian, pengelompokan akun, penyusunan laporan laba rugi sederhana, dan penyusunan laporan arus kas. Penyampaian materi dilakukan menggunakan contoh transaksi yang berasal dari aktivitas usaha BUMDes sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan proses pencatatan hingga menghasilkan laporan keuangan sederhana.

Selain aspek keuangan, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi perpajakan yang membahas kewajiban perpajakan BUMDes, pentingnya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara perhitungan pajak, serta mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada sesi diskusi, sebagian besar peserta menyampaikan bahwa sebelumnya mereka menganggap pajak hanya sebagai beban tambahan bagi usaha desa. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa kepatuhan perpajakan justru menjadi salah satu indikator kredibilitas lembaga dan dapat meningkatkan peluang kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga keuangan. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi selama sesi diskusi dan praktik. Pengurus BUMDes aktif menyampaikan berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pencatatan keuangan maupun pelaporan pajak sehingga proses pendampingan berlangsung secara interaktif (Gambar 2).



Gambar 2 pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi keuangan serta perpajakan

Sumber: data primer

Penguatan implementasi melalui digitalisasi pembukuan

Tahap ketiga difokuskan pada penguatan implementasi hasil pelatihan melalui pendampingan langsung dan pemanfaatan teknologi digital. Pada tahap ini, pengurus BUMDes didampingi dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi riil yang terjadi pada masing-masing unit usaha. Tim pengabdian memberikan bimbingan mengenai penyusunan laporan secara periodik serta melakukan koreksi terhadap kesalahan pencatatan yang masih ditemukan. Selain itu, pengurus diperkenalkan dengan aplikasi pembukuan digital sederhana sebagai alternatif pencatatan keuangan yang lebih efektif

dibandingkan sistem manual. Penggunaan aplikasi tersebut membantu pengurus dalam mencatat transaksi secara lebih cepat, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta memudahkan penyusunan laporan keuangan secara otomatis. Digitalisasi pembukuan juga mempermudah proses penyimpanan data sehingga dokumen keuangan menjadi lebih rapi dan mudah ditelusuri ketika diperlukan.

Pendampingan pada tahap ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga mencakup penyusunan anggaran usaha dan pengelolaan arus kas. Pengurus BUMDes diberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keuangan dalam menjaga stabilitas operasional usaha, mengendalikan pengeluaran, serta mendukung pengembangan unit usaha di masa mendatang. Dengan adanya pendampingan tersebut, pengurus mulai mampu memanfaatkan informasi keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha.

Evaluasi dan tindak lanjut

Tahap terakhir merupakan kegiatan evaluasi terhadap hasil pendampingan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui penelaahan dokumen keuangan yang telah disusun peserta, diskusi bersama pengurus BUMDes, serta identifikasi perubahan kompetensi setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus dalam menyusun laporan keuangan maupun memahami administrasi perpajakan.

Pengurus telah mampu melakukan pencatatan transaksi secara lebih sistematis serta menyusun laporan laba rugi sederhana berdasarkan aktivitas masing-masing unit usaha. Selain itu, pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan juga mengalami peningkatan. Pengurus mulai memahami prosedur administrasi perpajakan dan pentingnya pelaporan pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala teknis, terutama dalam penggunaan aplikasi pembukuan digital secara optimal dan perhitungan pajak pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, tim pengabdian memberikan pendampingan lanjutan berupa konsultasi teknis agar implementasi yang telah dilakukan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel 2 hasil evaluasi program pendampingan

Aspek evaluasi	Hasil yang dicapai	Status
Pencatatan transaksi	Pengurus mampu mencatat transaksi secara sistematis	Tercapai
Penyusunan laporan keuangan	Laporan laba rugi sederhana telah dapat disusun	Tercapai
Pemahaman perpajakan	Pemahaman mengenai NPWP dan SPT meningkat	Perlu pendampingan lanjutan
Pemanfaatan aplikasi digital	Sudah mulai diterapkan dalam pencatatan transaksi	Dalam proses implementasi
Transparansi administrasi	Dokumentasi keuangan menjadi lebih tertata	Tercapai

Sumber: data primer, diproses

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan tata kelola BUMDes Desa Katemas. Perubahan yang paling terlihat adalah meningkatnya kemampuan pengurus dalam melakukan pencatatan keuangan secara sistematis, tersusunnya laporan keuangan sederhana sebagai dasar evaluasi usaha, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan perpajakan. Selain itu, pengenalan pembukuan digital menjadi langkah awal dalam mendukung modernisasi

administrasi BUMDes sehingga proses pengelolaan usaha menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memperkuat kapasitas pengurus BUMDes dalam aspek pengelolaan keuangan dan perpajakan. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu mendukung keberlanjutan usaha BUMDes, meningkatkan kepercayaan pemerintah desa dan masyarakat, serta memperluas peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, program pendampingan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan tata kelola BUMDes yang profesional dan berkelanjutan.

Pembahasan

Program pendampingan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa penguatan tata kelola BUMDes tidak dapat dilakukan hanya melalui pemberian materi secara teoritis, tetapi memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan riil organisasi. Temuan selama kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi BUMDes desa Katemas bukan terletak pada keterbatasan potensi usaha, melainkan pada kapasitas kelembagaan dalam mengelola administrasi keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek tata kelola (*governance*) menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan BUMDes. Tata kelola yang baik akan menghasilkan informasi keuangan yang andal, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas kepada pemerintah desa dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Peningkatan kemampuan pengurus dalam menyusun laporan keuangan sederhana menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis praktik (*learning by doing*) lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara konvensional. Selama proses pendampingan, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai konsep pencatatan transaksi, tetapi juga secara langsung menerapkan pencatatan berdasarkan transaksi usaha yang mereka kelola. Pendekatan tersebut memudahkan peserta memahami hubungan antara transaksi, proses pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan sebagai dasar evaluasi kinerja usaha. Temuan ini sejalan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Monoarfa et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung mampu meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan operasional. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Be et al. (2024), bahwa penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dibandingkan pelatihan yang hanya bersifat satu kali.

Perubahan pola pencatatan keuangan dari sistem manual menuju pencatatan yang lebih sistematis menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola administrasi BUMDes. Laporan keuangan tidak lagi dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif, tetapi mulai dimanfaatkan sebagai instrumen manajemen dalam mengevaluasi kinerja usaha, mengendalikan arus kas, dan merencanakan pengembangan unit usaha. Perubahan paradigma tersebut merupakan salah satu indikator meningkatnya literasi keuangan pengelola BUMDes. Kondisi ini mendukung pendapat Rinaldi et al. (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMDes dan memperkuat kemampuan organisasi dalam mengambil

keputusan berbasis data. Dengan tersedianya laporan keuangan yang lebih terstruktur, pengurus memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan usaha sehingga keputusan strategis tidak lagi didasarkan pada perkiraan, melainkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil kegiatan juga memperlihatkan bahwa aspek perpajakan merupakan salah satu bidang yang selama ini masih kurang dipahami oleh pengelola BUMDes. Sebelum pendampingan, kewajiban perpajakan cenderung dipersepsikan sebagai beban yang mengurangi keuntungan usaha. Setelah kegiatan sosialisasi, terjadi perubahan pemahaman bahwa kepatuhan perpajakan merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan yang mendukung kredibilitas organisasi. Perubahan perspektif tersebut menjadi capaian penting karena kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga mencerminkan tingkat profesionalisme suatu badan usaha. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Wardani & Wati (2018) dan Nugroho & Kurnia (2020) yang menjelaskan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi secara langsung berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Adawiyah et al. (2023) menegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi perpajakan merupakan salah satu determinan utama dalam membentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Integrasi antara pendampingan keuangan dan edukasi perpajakan menjadi salah satu keunggulan program ini dibandingkan sebagian besar kegiatan pengabdian sebelumnya. Banyak program penguatan kapasitas BUMDes lebih berfokus pada peningkatan kemampuan pembukuan atau digitalisasi administrasi, sedangkan aspek perpajakan belum menjadi perhatian utama. Padahal, kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Laporan keuangan yang baik merupakan prasyarat utama dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan secara benar. Sebaliknya, kepatuhan perpajakan akan semakin mudah diwujudkan apabila didukung oleh sistem pencatatan keuangan yang tertib. Dengan demikian, integrasi kedua aspek tersebut menghasilkan tata kelola yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan organisasi. Temuan ini mendukung gagasan Rinaldi et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kredibilitas kelembagaan BUMDes sehingga memperluas peluang memperoleh akses pembiayaan dan kemitraan eksternal.

Pengenalan aplikasi pembukuan digital juga memberikan implikasi yang penting terhadap peningkatan efisiensi administrasi BUMDes. Meskipun implementasinya masih berada pada tahap awal, penggunaan aplikasi mulai mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual dan mempermudah proses penyusunan laporan keuangan secara periodik. Digitalisasi administrasi memungkinkan data keuangan tersimpan dengan lebih aman, mudah ditelusuri, serta meminimalkan risiko kehilangan dokumen maupun kesalahan pencatatan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Erlina & Sirojuzilam (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pencatatan keuangan berbasis teknologi mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUMDes melalui peningkatan efisiensi dan akurasi data. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Isnawati et al. (2026) dan Wahdah & Huda (2026), bahwa penggunaan aplikasi pembukuan sederhana merupakan alternatif yang sesuai bagi BUMDes karena mudah dioperasikan, tidak membutuhkan biaya tinggi, serta mampu meningkatkan kualitas pengendalian internal organisasi.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses penguatan kapasitas belum sepenuhnya selesai dalam satu siklus kegiatan pengabdian. Beberapa pengurus masih memerlukan pendampingan lanjutan, terutama dalam memahami perhitungan pajak pada

kondisi transaksi tertentu, penggunaan fitur aplikasi digital secara optimal, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih lengkap sesuai periode akuntansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kapasitas kelembagaan merupakan proses jangka panjang yang memerlukan pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan setelah pelatihan, tetapi juga dari konsistensi penerapan sistem administrasi yang telah diperkenalkan. Pendampingan berkala, monitoring, dan evaluasi menjadi faktor penting agar perubahan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan terus berkembang.

Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola BUMDes desa Katemas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem administrasi keuangan, penguatan kepatuhan perpajakan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha desa. Integrasi keempat aspek tersebut menghasilkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional sehingga mendukung peningkatan kepercayaan pemerintah desa, masyarakat, maupun mitra eksternal. Dalam jangka panjang, penguatan tata kelola ini diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan usaha BUMDes, memperluas akses terhadap sumber pembiayaan, serta mengoptimalkan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan manfaat praktis bagi BUMDes Desa Katemas, model pendampingan yang diterapkan juga memiliki potensi untuk direplikasi pada BUMDes lain yang menghadapi permasalahan serupa, khususnya yang masih mengalami keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan.

Kesimpulan

Program penguatan tata kelola BUMDes melalui pendampingan keuangan dan sosialisasi pajak di desa Katemas, kecamatan Kudu, kabupaten Jombang telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Melalui rangkaian kegiatan yang meliputi observasi awal, pelatihan, pendampingan implementasi, serta evaluasi, pengurus BUMDes menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melakukan pencatatan transaksi secara lebih sistematis, menyusun laporan keuangan sederhana, memahami administrasi perpajakan, serta mulai memanfaatkan aplikasi pembukuan digital untuk mendukung pengelolaan usaha. Pendekatan pendampingan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan praktis peserta sehingga tata kelola BUMDes menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kelembagaan BUMDes melalui integrasi pendampingan keuangan dan sosialisasi perpajakan sebagai satu kesatuan dalam tata kelola organisasi. Penguatan kapasitas tersebut tidak hanya mendukung tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan kredibilitas BUMDes dalam membangun kepercayaan pemerintah desa, masyarakat, maupun mitra eksternal. Meskipun demikian, optimalisasi pemanfaatan aplikasi pembukuan digital dan penerapan administrasi perpajakan secara mandiri masih memerlukan pendampingan lanjutan agar perubahan yang telah dicapai dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, model pendampingan yang diterapkan dalam kegiatan ini berpotensi menjadi rujukan bagi program pengabdian serupa pada BUMDes lain dalam

upaya memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing usaha desa, serta mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Daftar pustaka

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Baharuddin, K. H., Smith, K. A. H., Fathony, H. R., Yuswanita, L., & Wijayati, T. (2025). Peningkatan Pengendalian Manajemen, Kepatuhan Perpajakan, dan Literasi Keuangan untuk Keberlanjutan Bumdes Desa Guntung Besar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 9258–9265. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3270>
- Be, E., Oki, K. K., & Babulu, N. L. (2024). Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDes di Desa Oinbit Kecamatan Insana. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 206–215. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v4i2.354>
- Dahlan, A., Wijayanti, T. C., Hastuti, S., Haritsar, Y., Kurniawan, D., Rini, Y. T., & Ra'is, D. U. (2025). Peningkatan Literasi Core Tax Untuk Pengelola Bumdes: Strategi Menuju Tata Kelola Yang Taat Pajak Dan Akuntabel. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 547–552. <https://doi.org/10.61722/japm.v3i6.8696>
- Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Bumdes Sistem Akuntansi Bumdes Berbasis Web. *Owner*, 4(1), 282. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.195>
- Firmansyah, D. (2025). Strategi Pengembangan BUMDES Mulyo Lestari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rejomulyo. *JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 47–53. <https://doi.org/10.70214/ah5zf450>
- Gani, A. (2025). Peran BUMDes Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa Di Kecamatan Banyuputih. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v7i1.348>
- Isnawati, I., Effendy, L., Isnaini, Z., & Indriani, E. (2026). Rekayasa Aplikasi Akuntansi Berbasis Excel Bagi Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Sedau. *Jurnal Abdi Insani*, 13(5), 693–703. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i5.3490>
- Khoirunnisa, A. (2025). Pelatihan Manajemen Usaha dan Pemasaran Digital untuk Penguatan Kapasitas Organisasi BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan. *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 2(3), 234–248. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v2i3.1776>
- Lazuardi, P., Yanthi, W. D., Owllyah, M., & Lestari, P. (2026). Pendampingan Perencanaan Pajak Sederhana pada UKM Desa untuk Meningkatkan Efisiensi Usaha melalui Peran BUMDes. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 26877–26883. <https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/6511>
- Monoarfa, R., Noholo, S., & Ahmad, S. H. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 2(2), 89–97. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v2i2.60>
- Mursidah, M., & Mu'awwanah, U. (2026). Penguatan Tata Kelola, Transparansi, dan

- Akuntabilitas Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pesisir Melalui Pendampingan Partisipatif. *At-Tamkin - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 77–104. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/attamkin/article/view/10594>
- Mustoffa, A. F., Ulfah, I. F., & Wijianto, W. (2025). Pendampingan Penyusunan Administrasi dan Laporan Keuangan Pada Amal Usaha Muhammadiyah Wilayah Kabupaten Madiun dan Magetan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 6(1), 119–136. <https://doi.org/10.32528/manage.v6i1.2807>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767>
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., & Ariandi, M. A. (2025). Pendampingan Literasi Keuangan dan Pajak sebagai Upaya Transparansi dan Akuntabilitas BUMDes serta UMKM Desa. *GIAT Teknologi Untuk Masyarakat*, 4(2), 131–140. <https://doi.org/10.24002/giat.v4i2.12814>
- Sari, N. F. D., & Narastri, M. (2026). Analisis Manajemen BUMDes dalam Mendukung Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 12(1), 106–121. <https://doi.org/10.53494/jira.v12i1.1295>
- Wahdah, S., & Huda, K. (2026). Inovasi Sistem Pembukuan Digital Sederhana Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Efisiensi Keuangan: Studi Kasus UMKM Produksi Plastik Di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 74–86. <https://doi.org/10.46368/dpkm.v6i1.4823>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>